

Pandangan Masyarakat Terhadap PSI yang Dikatakan Partai Kaum Muda

Isabella Julisty Tampi¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
 Email: ¹20606054@gmail.com ²romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 02, 2025

Accepted July 31, 2025

Published July 31, 2025

Kata Kunci:

Partai Solidaritas
 Indonesia,
 Persepsi Masyarakat,
 Partai Kaum Muda,
 Kepemimpinan
 Milenial,
 Legitimasi Politik



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengklaim sebagai partai representasi kaum muda, khususnya dalam konteks kepemimpinan Kaesang Pangarep dan dinamika politik yang melingkupinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga narasumber yang dipilih secara purposive dan observasi terhadap aktivitas politik PSI. Hasil penelitian mengungkapkan adanya ambivalensi dalam persepsi masyarakat yang ditandai oleh tiga temuan utama: pertama, persepsi kompleks terhadap kepemimpinan Kaesang yang dipandang antara representasi kepemimpinan muda dan produk dari politik dinasti; kedua, apresiasi terhadap idealisme dan energi yang dibawa PSI sebagai partai milenial yang menawarkan alternatif politik yang bersih dan progresif; ketiga, skeptisisme signifikan terhadap kredibilitas dan kemandirian politik PSI yang dipersepsikan memiliki koneksi erat dengan struktur kekuasaan eksisting. Temuan ini menunjukkan bahwa legitimasi PSI sebagai partai kaum muda menghadapi tantangan dalam menerjemahkan popularitas simbolik menjadi kepercayaan publik dan dukungan elektoral yang solid.

Abstract

This study aims to explore and analyze public perceptions of the Indonesian Solidarity Party (PSI), which claims to be a youth-representative party, particularly in the context of Kaesang Pangarep's leadership and the political dynamics surrounding it. The research method employed a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with three purposively selected informants and observations of PSI's political activities. The results revealed an ambivalence in public perception characterized by three main findings: first, a complex perception of Kaesang's leadership, which is seen as both a representation of youth leadership and a product of dynastic politics; second, an appreciation of the idealism and energy brought by PSI as a millennial party offering a clean and progressive political alternative; and third, significant skepticism of PSI's credibility and political independence, which is perceived to have a close connection to the existing power structure. These findings suggest that PSI's legitimacy as a youth party faces challenges in translating symbolic popularity into public trust and solid electoral support.

Keywords: Indonesian Solidarity Party, Public Perception, Youth Party, Millennial Leadership, Political Legitimacy

A. Pendahuluan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hadir sebagai partai politik baru dalam konstelasi perpolitikan Indonesia yang menonjolkan identitas sebagai partai kaum muda. Sejak deklarasinya pada tahun 2014 dan kemudian resmi menjadi peserta pemilu pada 2019, PSI memposisikan diri sebagai representasi generasi milenial dan Gen Z dengan mengusung isu-isu yang dekat dengan kehidupan anak muda seperti transparansi, antikorupsi, lingkungan hidup, dan modernisasi birokrasi (Herdiansah et al., 2017). Strategi branding sebagai partai kaum

muda ini menjadi diferensiasi PSI di tengah dominasi partai-partai established yang mayoritas dipimpin oleh elite politik senior. Namun demikian, label "partai kaum muda" ini menuai beragam respons dari masyarakat, mulai dari dukungan antusias hingga skeptisisme terhadap kemampuan partai baru dalam arena politik praktis yang kompleks (Pamungkas, 2018).

Fenomena kemunculan partai yang menargetkan pemilih muda sebenarnya bukan hal baru dalam studi politik kontemporer. Di berbagai negara, partai-partai baru sering menggunakan narasi generasional untuk menarik dukungan dan membedakan diri dari kompetitor (Norris, 2005). Dalam konteks Indonesia, segmentasi pemilih berdasarkan usia menjadi semakin relevan mengingat bonus demografi yang sedang dialami, di mana mayoritas penduduk Indonesia berada pada usia produktif dengan populasi milenial dan Gen Z yang mencapai lebih dari 50 persen dari total pemilih (Qodari, 2019). Karakteristik pemilih muda yang lebih terdidik, melek teknologi, dan kritis terhadap status quo politik memberikan peluang sekaligus tantangan bagi partai seperti PSI untuk mentransformasikan dukungan simbolik menjadi suara elektoral yang signifikan. Studi mengenai perilaku pemilih muda menunjukkan bahwa meskipun mereka responsif terhadap isu-isu progresif, tingkat partisipasi politik dan loyalitas terhadap partai politik masih relatif rendah dibandingkan pemilih senior (Aspinall & Berenschot, 2019).

Persepsi masyarakat terhadap PSI sebagai partai kaum muda tidak terlepas dari dinamika komunikasi politik di era digital. PSI secara masif memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye dan interaksi dengan konstituen, strategi yang sejalan dengan pola konsumsi media pemilih muda (Lim, 2017). Penggunaan bahasa yang lebih santai, konten visual yang menarik, dan isu-isu yang viral di media sosial menjadi ciri khas komunikasi politik PSI. Namun, efektivitas strategi digital ini dalam membangun basis massa yang solid masih menjadi perdebatan, terutama ketika performa elektoral PSI pada Pemilu 2019 dan 2024 belum menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan perolehan suara di bawah ambang batas parlemen (Mietzner, 2020). Hal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai gap antara popularitas di ranah digital dengan dukungan elektoral riil, serta bagaimana masyarakat dari berbagai latar belakang demografis sebenarnya memandang klaim PSI sebagai representasi kaum muda.

Penelitian sebelumnya mengenai partai politik baru di Indonesia telah memberikan berbagai perspektif tentang tantangan dan strategi yang dihadapi. Herdiansah et al. (2017) dalam studinya tentang strategi komunikasi politik partai baru menemukan bahwa penggunaan media sosial dan branding generasional menjadi kunci untuk menarik perhatian pemilih muda, namun tidak cukup untuk mengonversi awareness menjadi dukungan elektoral yang kuat. Studi tersebut mengidentifikasi bahwa partai baru cenderung kuat dalam membangun citra simbolik namun lemah dalam membangun struktur organisasi dan jaringan grassroot yang merupakan fondasi penting dalam politik elektoral Indonesia. Sementara itu, Aspinall dan Berenschot (2019) dalam riset komprehensif mereka tentang demokrasi dan politik lokal di Indonesia menyoroti bahwa pemilih muda meskipun lebih terbuka terhadap partai baru, tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor tradisional seperti patronase, identitas primordial, dan pengaruh tokoh lokal, yang membuat penetrasi partai baru seperti PSI menghadapi hambatan struktural.

Penelitian Qodari (2019) tentang perilaku politik generasi milenial Indonesia memberikan temuan penting bahwa pemilih muda memiliki karakteristik yang paradoks: di satu sisi mereka lebih kritis dan menginginkan perubahan, namun di sisi lain mereka menunjukkan tingkat apatisisme politik yang tinggi dengan kecenderungan golput yang signifikan. Studi ini menunjukkan bahwa identifikasi generasional saja tidak cukup untuk memobilisasi dukungan politik, karena pemilih muda juga mempertimbangkan isu-isu substantif seperti ekonomi, kesempatan kerja, dan program konkret yang ditawarkan. Mietzner (2020) dalam analisisnya tentang sistem kepartaian Indonesia pasca-Reformasi mengemukakan bahwa partai-partai baru menghadapi dilema struktural dalam sistem politik Indonesia yang oligarkis, di mana akses ke

sumber daya finansial dan jaringan elite menjadi determinan krusial bagi survival partai, sementara PSI yang mengusung platform anti-establishment justru kesulitan mengakses sumber daya tersebut.

Meskipun berbagai penelitian telah mengeksplorasi dinamika partai baru dan perilaku pemilih muda di Indonesia, masih terdapat gap signifikan dalam literatur mengenai persepsi komprehensif masyarakat terhadap PSI khususnya dalam kapasitasnya sebagai "partai kaum muda". Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek strategi komunikasi partai atau perilaku pemilih secara umum, namun belum secara mendalam menganalisis bagaimana masyarakat dari berbagai segmen demografis (bukan hanya kaum muda) memandang dan menilai klaim serta kinerja PSI sebagai representasi generasi muda. Gap ini penting karena legitimasi sebuah partai tidak hanya ditentukan oleh target konstituennya, tetapi juga oleh persepsi masyarakat luas yang pada akhirnya menentukan elektabilitas dan sustainability partai dalam jangka panjang. Selain itu, dinamika persepsi masyarakat terhadap PSI juga perlu dipahami dalam konteks perubahan lanskap politik digital dan fenomena polarisasi politik yang semakin menguat di Indonesia.

Research gap lainnya terletak pada minimnya kajian yang mengeksplorasi diskrepansi antara popularitas PSI di media sosial dengan performa elektoral yang relatif rendah. Fenomena ini mengindikasikan adanya perbedaan antara dukungan simbolik atau popularitas virtual dengan dukungan politik riil yang terkonversi menjadi suara. Penelitian sebelumnya belum secara komprehensif membedah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gap ini terjadi, apakah itu terkait dengan kredibilitas partai, keterbatasan sumber daya, masalah struktural organisasi, atau memang adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap partai kaum muda dengan realitas politik praktis yang dihadapi PSI. Pemahaman tentang persepsi masyarakat yang multidimensional ini penting untuk menjelaskan paradoks antara visibilitas tinggi PSI di ruang publik digital dengan capaian elektoral yang belum optimal.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif dalam memahami persepsi masyarakat terhadap PSI yang tidak hanya terbatas pada segmen pemilih muda sebagai target utama partai, tetapi juga mencakup pandangan dari berbagai kelompok usia, latar belakang sosial-ekonomi, dan orientasi politik. Pendekatan ini memungkinkan untuk menangkap spektrum persepsi yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana label "partai kaum muda" diterima, diinterpretasikan, dan dinilai oleh publik. Dengan mengintegrasikan analisis terhadap dimensi simbolik (citra dan branding partai) dan dimensi substantif (program, kinerja, dan kapabilitas politik), penelitian ini dapat memberikan gambaran holistik tentang konstruksi persepsi publik terhadap PSI. Kebaruan ini penting karena dapat mengungkapkan apakah identitas generasional yang diusung PSI benar-benar resonan dengan masyarakat atau justru menciptakan stereotipe dan limitasi tertentu dalam persepsi publik.

Aspek kebaruan lainnya adalah fokus pada konteks politik kontemporer Indonesia yang ditandai dengan perubahan ekosistem media, meningkatnya literasi politik digital, dan munculnya isu-isu baru yang relevan dengan generasi muda seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan reformasi birokrasi. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana PSI dipersepsikan dalam merespons isu-isu kontemporer tersebut dan sejauh mana masyarakat menilai konsistensi antara retorika partai sebagai representasi kaum muda dengan aksi politik konkret yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan insight tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap PSI berevolusi seiring waktu, terutama setelah dua kali mengikuti pemilu dengan hasil yang belum memuaskan, dan bagaimana hal ini mempengaruhi proyeksi masa depan partai dalam sistem politik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur tentang partai politik baru dan perilaku pemilih, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi strategi politik partai dalam membangun

legitimasi dan dukungan publik.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa PSI menghadapi tantangan kompleks dalam mewujudkan misinya sebagai partai kaum muda yang transformatif. Meskipun berhasil membangun brand awareness yang kuat di kalangan netizen dan segmen pemilih urban terdidik, PSI belum mampu menerjemahkan popularitas digital menjadi basis massa yang kuat di tingkat akar rumput. Perolehan suara PSI pada Pemilu 2019 sebesar 1,89 persen dan kemudian pada Pemilu 2024 yang masih di bawah ambang batas parlemen mencerminkan gap antara visibilitas dengan elektabilitas. Fenomena ini mengindikasikan bahwa persepsi positif di media sosial tidak otomatis berkorelasi dengan dukungan elektoral, terutama di daerah-daerah di luar kota-kota besar di mana struktur politik tradisional masih dominan dan penetrasi digital belum merata. Selain itu, label "partai kaum muda" yang awalnya menjadi kekuatan juga berpotensi menjadi limitasi karena dapat dipersepsikan sebagai partai yang eksklusif, hanya untuk segmen tertentu, atau dianggap kurang berpengalaman dalam mengelola kompleksitas politik praktis.

Dinamika persepsi masyarakat terhadap PSI juga dipengaruhi oleh konteks politik yang lebih luas, termasuk polarisasi politik, kompetisi dengan partai-partai established yang juga mulai merangkul isu-isu dan kader muda, serta ekspektasi tinggi masyarakat terhadap partai yang mengusung platform perubahan dan antikorupsi. PSI harus berhadapan dengan skeptisisme publik yang terbentuk dari kekecewaan terhadap janji-janji politik yang tidak terwujud dari partai-partai lain, sekaligus membuktikan bahwa mereka mampu menjadi alternatif politik yang kredibel. Persepsi masyarakat juga dibentuk oleh berbagai insiden dan kontroversi yang melibatkan kader PSI, serta dinamika koalisi dan manuver politik yang dilakukan partai. Realitas ini menunjukkan bahwa membangun dan mempertahankan persepsi positif memerlukan konsistensi antara narasi, ideologi, dan praksis politik yang tidak mudah dicapai dalam sistem politik Indonesia yang kompleks dan kompetitif. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat memandang PSI sebagai partai kaum muda menjadi krusial tidak hanya untuk evaluasi strategi politik partai, tetapi juga untuk memahami dinamika demokrasi dan partisipasi politik generasi muda di Indonesia kontemporer.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pandangan dan persepsi masyarakat terhadap PSI sebagai partai yang mengklaim sebagai representasi kaum muda. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, interpretasi, dan pengalaman subjektif informan dalam memandang fenomena politik kontemporer (Creswell, 2014). Metode kualitatif memberikan fleksibilitas dalam menggali data yang kaya dan kontekstual mengenai persepsi masyarakat yang bersifat kompleks dan multidimensional, terutama dalam konteks politik yang dinamis. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya "apa" yang dipersepsikan oleh masyarakat, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" persepsi tersebut terbentuk (Denzin & Lincoln, 2011).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap tiga narasumber yang dipilih secara purposive untuk mendapatkan variasi perspektif mengenai PSI sebagai partai kaum muda. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan narasumber untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dan elaboratif (Kvale & Brinkmann, 2009). Metode wawancara dipilih karena mampu menangkap nuansa, konteks, dan detail dari pandangan informan yang tidak dapat diperoleh melalui metode survei kuantitatif. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap aktivitas dan komunikasi politik PSI, terutama yang berkaitan dengan bagaimana partai memposisikan diri

sebagai representasi kaum muda dan bagaimana respons publik terhadap narasi tersebut.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Data dari hasil wawancara ditranskrip secara verbatim dan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola persepsi yang muncul. Observasi terhadap fenomena politik PSI dilakukan untuk memberikan konteks dan triangulasi data terhadap temuan dari wawancara. Validitas data dijaga melalui kredibilitas dengan melakukan member checking, transferabilitas dengan deskripsi yang mendalam, dependabilitas melalui audit trail, dan konfirmabilitas dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan temuan yang tidak hanya deskriptif namun juga interpretatif, yang mampu menjelaskan kompleksitas persepsi masyarakat terhadap PSI dalam konteks politik Indonesia kontemporer.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Persepsi Terhadap Kepemimpinan Kaesang dan Dinamika Politik Keluarga

Temuan pertama dari penelitian ini mengungkapkan adanya persepsi yang kompleks dan ambivalen di masyarakat terkait kepemimpinan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber, terlihat bahwa kepemimpinan Kaesang menjadi focal point dalam pembentukan persepsi masyarakat terhadap PSI sebagai partai kaum muda. Bapak JW secara eksplisit menyatakan,

“...yah menurut pandangan saya berbicara tentang PSI memang secara umum masyarakat belum kenal dengan Kaesang yang merupakan ketua partai PSI, dia kenal setelah direkrut untuk masuk partai terlebih menjadi ketua partai PSI, menurut kami terlalu dini karena belum ada pengalaman sudah langsung ditunjuk menjadi ketua partai, dan menjadi ketua partai di PSI sedangkan orang tuanya pejabat selaku mereka itu ada dipartai yang berseberangan. Kenapa anaknya memilih untuk tidak mau mengikuti partai ayahnya. Ini politik yang sekarang menurut kami bukan politik yang sehat karena membuat masyarakat bingung”.

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak JW



Sumber: Data Primer

Dimensi yang paling kontroversial dari kepemimpinan Kaesang adalah keterkaitannya dengan posisi ayahnya sebagai Presiden Indonesia, yang menciptakan dinamika politik keluarga yang dipersepsikan problematik oleh sebagian masyarakat. Bapak JW secara tegas

mempertanyakan logika politik di mana Kaesang memilih bergabung dengan PSI yang notabene berada di posisi yang berbeda dengan afiliasi politik ayahnya. Situasi ini dipersepsikan sebagai bentuk "politik yang tidak sehat" yang justru menimbulkan kebingungan di masyarakat. Persepsi ini mengungkapkan kekhawatiran tentang integritas dan konsistensi politik, di mana pilihan politik anggota keluarga presiden yang berbeda dengan afiliasi ayahnya dapat diinterpretasikan sebagai strategi politik pragmatis untuk memperluas pengaruh keluarga di berbagai spektrum politik. Namun di sisi lain, Bapak YS justru melihat kepemimpinan Kaesang dari perspektif yang lebih positif, di mana kehadirannya sebagai ketua partai dipandang dapat membangkitkan kebanggaan kaum milenial karena memberikan representasi kepemimpinan muda di level nasional.

Ambivalensi persepsi terhadap kepemimpinan Kaesang ini mencerminkan dilema yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat Indonesia memandang interseksi antara politik dinasti, kepemimpinan muda, dan legitimasi politik. Di satu sisi, ada ekspektasi dan apresiasi terhadap kehadiran pemimpin muda yang dianggap dapat membawa energi dan perspektif baru dalam politik. Namun di sisi lain, terdapat skeptisisme yang kuat ketika jalur kepemimpinan tersebut dipersepsikan lebih didasarkan pada privilege dan koneksi keluarga ketimbang meritokrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa label "partai kaum muda" saja tidak cukup untuk membangun legitimasi di mata publik, karena masyarakat juga mengevaluasi substansi, kredibilitas, dan independensi kepemimpinan partai. Persepsi yang beragam ini mengindikasikan bahwa PSI menghadapi tantangan dalam membangun narasi yang koheren tentang kepemimpinan yang mampu menjembatani ekspektasi berbagai segmen masyarakat.

b. Apresiasi Terhadap Idealisme dan Energi Kaum Milenial

Temuan kedua mengungkapkan adanya apresiasi yang signifikan dari sebagian masyarakat terhadap idealisme dan semangat yang dibawa PSI sebagai partai kaum milenial. MW secara eksplisit menyatakan,

“...Pandangan saya mengacungi jempol terhadap partai PSI partai baru partai solidaritas Indonesia, partai kaum milenial kan?, partai yang punya komitmen, partai baru tapi partai bersih meskipun belum ada gosip parlemen kan? Itu PSI partai yang penuh energik karena diduduki oleh kaum milenial terutama yang menjadi ketua sekarang anaknya presiden. Partai yang sangat banyak diminati oleh kaum milenial, partai yang sangat penuh kharismatik, dan juga partai yang sangat berpihak pada masyarakat terutama kaum milenial”.

Gambar 2. Wawancara dengan MW



Sumber: Data Primer

Apresiasi terhadap PSI juga terkait dengan persepsi bahwa partai ini "sangat berpihak pada masyarakat terutama kaum milenial". Pernyataan ini mengindikasikan bahwa upaya PSI untuk memposisikan diri sebagai representasi kaum muda berhasil menciptakan sense of ownership

dan identifikasi di kalangan segmen tertentu dari populasi milenial. Persepsi tentang keberpihakan ini penting karena mencerminkan ekspektasi masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap partai politik yang tidak hanya secara retorik mengklaim mewakili mereka tetapi juga secara substantif memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan kehidupan dan aspirasi mereka. Penggunaan istilah "kharismatik" untuk mendeskripsikan PSI juga menunjukkan bahwa partai ini berhasil membangun daya tarik simbolik dan emosional, bukan hanya melalui program atau ideologi tetapi juga melalui persona dan gaya komunikasi politik yang berbeda dari mainstream.

Namun demikian, apresiasi terhadap idealisme dan energi milenial ini juga diiringi dengan catatan kritis tentang substansi dan implementasi. Bapak YS, meskipun mengapresiasi pengangkatan pemimpin muda, memberikan pesan penting bahwa menjadi pemimpin bukan sekadar soal status atau kemewahan jabatan, melainkan tentang tanggung jawab dan kepedulian sebagaimana kepemimpinan dalam konteks keluarga. Perspektif ini mengungkapkan ekspektasi masyarakat yang lebih dalam: bahwa kepemimpinan muda harus diimbangi dengan kedewasaan, kebijaksanaan, dan orientasi melayani bukan berkuasa. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada apresiasi terhadap kehadiran partai kaum muda, masyarakat tetap memiliki ekspektasi tinggi terhadap kualitas kepemimpinan dan substansi politik yang ditawarkan. PSI dengan demikian tidak hanya dinilai dari seberapa muda kadernya atau seberapa modern komunikasi politiknya, tetapi juga dari seberapa matang visi politiknya dan seberapa konsisten implementasi nilai-nilai yang dikampanyekan.

c. Skeptisisme Terhadap Kredibilitas dan Kemandirian Politik

Temuan ketiga mengungkapkan adanya skeptisisme yang cukup kuat di masyarakat terkait kredibilitas dan kemandirian politik PSI, terutama dalam kaitannya dengan dinamika kekuasaan yang lebih luas. Keraguan yang paling mengemuka adalah persepsi bahwa kepemimpinan Kaesang di PSI tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan posisi ayahnya sebagai presiden. Bapak YS secara eksplisit menyatakan,

“... Kalau pandangan saya PSI ini adalah partai yang baru terbentuk, yang saat ini diketuai oleh Kaesang. Dia menjadi ketua kemungkinan ini ada kaitannya dengan ayahnya sebagai penguasa republik Indonesia atau presiden. Dia menjadi ketua partai PSI karena dia pikir dia bisa karena ada ayahnya dia bisa memimpin partai ini. Menurut pandangan saya Kaesang menjadi ketua partai PSI untuk kaum milenial bangga kan? Karena kaum milenial diangkat sekarang oleh anaknya pak Jokowi sangat bangga, karena pemimpin-pemimpin muda sekarang memang bagus juga kalau buat saya anak muda sekarang harus ditingkatkan. Permintaan kami sebagai masyarakat menjadi pemimpin itu bukan cuman sekedar pemimpin, jangan membanggakan kepemimpinan itu jadi penguasa. Jadikanlah kekuasaan itu sama seperti kekuasaan dalam lingkup keluarga”.

Skeptisisme terhadap kemandirian politik PSI juga termanifestasi dalam pertanyaan kritis tentang inkonsistensi afiliasi politik dalam satu keluarga. Bapak JW mempertanyakan mengapa Kaesang tidak mengikuti partai ayahnya dan justru memilih partai yang berada di posisi berbeda, bahkan berpotensi berseberangan. Pertanyaan ini bukan sekadar soal preferensi politik individual, tetapi mencerminkan kekhawatiran yang lebih dalam tentang kemungkinan adanya strategi politik terselubung di mana keluarga penguasa mendiversifikasi afiliasi politiknya untuk memaksimalkan pengaruh di berbagai platform. Persepsi ini menciptakan narasi tentang "politik yang tidak sehat" karena dipandang mengaburkan batas antara kepentingan keluarga

dengan kepentingan publik, serta antara strategi politik personal dengan idealisme partai. Bagi masyarakat yang kritis, situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana PSI benar-benar independen dalam menentukan arah politik dan posisinya terhadap kebijakan pemerintah.

Skeptisisme ini juga berimplikasi pada persepsi tentang kapasitas PSI untuk menjadi kekuatan oposisi atau kontrol yang efektif terhadap kekuasaan. Jika partai dipersepsikan memiliki koneksi erat dengan establishment melalui figur ketuanya, maka kredibilitas PSI dalam mengkritisi kebijakan pemerintah atau menjadi alternatif politik yang genuine menjadi dipertanyakan. Temuan ini mengungkapkan dilema fundamental yang dihadapi PSI: di satu sisi, kehadiran Kaesang sebagai ketua dapat meningkatkan visibilitas dan elektabilitas partai karena nama besar keluarganya; namun di sisi lain, asosiasi tersebut justru dapat mengikis kredibilitas PSI sebagai partai independen yang benar-benar mewakili aspirasi perubahan dari kaum muda. Persepsi skeptis ini menunjukkan bahwa untuk memenangkan kepercayaan publik yang lebih luas, PSI perlu secara konsisten mendemonstrasikan kemandirian politik, integritas, dan komitmen pada nilai-nilai yang dikampanyekan, terlepas dari koneksi personal ketuanya dengan struktur kekuasaan yang ada. Tantangan terbesar PSI adalah bagaimana membangun identitas politik yang autentik dan kredibel di tengah persepsi publik yang kompleks dan sering kali skeptis terhadap motif di balik kepemimpinan partai.

2. Pembahasan

a. Persepsi Terhadap Kepemimpinan Kaesang dan Dinamika Politik Keluarga

Temuan penelitian mengenai ambivalensi persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan Kaesang dapat dipahami melalui konsep legitimasi politik yang dikemukakan oleh Weber (1978), yang membedakan tiga tipe legitimasi: tradisional, kharismatik, dan legal-rasional. Dalam konteks kepemimpinan Kaesang di PSI, terdapat tegangan antara legitimasi yang berbasis pada koneksi keluarga (yang mendekati legitimasi tradisional-dinasti) dengan ekspektasi legitimasi legal-rasional yang menuntut kompetensi dan meritokrasi. Hal ini menciptakan paradoks di mana kepemimpinan muda yang seharusnya merepresentasikan perubahan dan meritokrasi justru dipersepsikan sebagai bentuk baru dari politik dinasti yang telah lama dikritik dalam demokrasi Indonesia. Aspinall dan Berenschot (2019) menjelaskan bahwa politik dinasti di Indonesia tetap kuat karena didukung oleh jaringan patron-klien dan akses ke sumber daya, namun dalam era demokrasi yang semakin matang, legitimasi dinasti semakin dipertanyakan oleh segmen masyarakat yang menginginkan pemimpin berdasarkan kapabilitas bukan koneksi.

Skeptisisme terhadap pengalaman politik Kaesang yang minim sebelum menjadi ketua partai mencerminkan apa yang oleh Norris (2005) disebut sebagai "political capital deficit" yang sering dihadapi oleh politisi muda atau pemimpin partai baru. Political capital mencakup pengalaman, jaringan, kredibilitas, dan rekam jejak yang telah dibangun dalam perjalanan politik seseorang. Dalam konteks Indonesia di mana politik masih sangat personalistik dan berbasis pada figur, ketiadaan political capital yang substansial dapat menjadi hambatan serius dalam membangun legitimasi, terlepas dari popularitas atau nama besar keluarga (Mietzner, 2020). Fenomena ini menjelaskan mengapa meskipun PSI berhasil mendapatkan atensi publik melalui kepemimpinan Kaesang, konversi popularitas menjadi dukungan politik riil masih menghadapi tantangan karena adanya keraguan tentang kapasitas kepemimpinan yang sesungguhnya.

Dinamika politik keluarga yang muncul dari pilihan Kaesang untuk memimpin partai yang berbeda dari afiliasi ayahnya dapat dianalisis melalui konsep strategic diversification dalam studi politik dinasti. Querubin (2016) dalam studinya tentang politik dinasti di Filipina

menunjukkan bahwa keluarga politik sering mendiversifikasi afiliasi partai anggota keluarganya sebagai strategi untuk memaksimalkan pengaruh dan meminimalkan risiko politik. Dalam konteks Indonesia, strategi ini memungkinkan keluarga untuk memiliki akses dan pengaruh di berbagai spektrum politik, sekaligus menciptakan buffer jika satu afiliasi politik mengalami kemunduran. Namun strategi ini juga menciptakan persepsi negatif tentang integritas dan konsistensi ideologi politik, di mana politik dipandang lebih sebagai instrumen kekuasaan keluarga daripada medium untuk memperjuangkan nilai dan kepentingan publik. Persepsi tentang "politik yang tidak sehat" yang muncul dari temuan penelitian ini sejalan dengan kritik Winters (2011) tentang oligarki di Indonesia, di mana elite politik menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh mereka termasuk melalui diversifikasi kekuasaan dalam institusi politik yang berbeda.

b. Apresiasi Terhadap Idealisme dan Energi Kaum Milenial

Apresiasi masyarakat terhadap PSI sebagai "partai bersih" dan "energik" mencerminkan apa yang oleh Norris (2011) disebut sebagai "democratic deficit" dalam sistem politik kontemporer, di mana masyarakat mengalami kekecewaan terhadap partai-partai established dan mencari alternatif politik yang dianggap lebih autentik dan berintegritas. Dalam konteks Indonesia, narasi antikorupsi dan pembaruan politik memiliki resonansi yang kuat karena pengalaman historis dengan korupsi yang endemik dalam institusi politik (Aspinall & Berenschot, 2019). PSI memanfaatkan momentum ini dengan memposisikan diri sebagai antitesis dari politik konvensional, mengusung nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan modernitas yang menarik bagi segmen masyarakat yang menginginkan perubahan fundamental dalam tata kelola politik. Strategi framing ini efektif dalam membangun identitas partai yang distinktif dan menarik perhatian media serta pemilih urban terdidik yang lebih kritis terhadap status quo politik.

Persepsi tentang keberpihakan PSI kepada kaum milenial dapat dipahami melalui konsep identity politics dan segmentasi politik generasional. Mannheim (1952) dalam teori generasinya menjelaskan bahwa setiap generasi membentuk consciousness politik yang unik berdasarkan pengalaman sosial-historis yang mereka alami bersama. Generasi milenial dan Gen Z di Indonesia tumbuh dalam era reformasi, digitalisasi, dan globalisasi yang membentuk nilai-nilai, aspirasi, dan cara berpolitik yang berbeda dari generasi sebelumnya (Qodari, 2019). PSI berhasil mengidentifikasi dan mengkapitalisasi karakteristik generasional ini dengan menggunakan bahasa, medium, dan isu yang relevan dengan kehidupan kaum muda. Namun demikian, Furlong dan Cartmel (2007) mengingatkan bahwa identity politics berbasis generasi juga mengandung risiko esensialisme dan simplifikasi, di mana asumsi homogenitas dalam satu generasi dapat mengabaikan diversitas pengalaman, kepentingan, dan orientasi politik yang ada di dalamnya.

Ekspektasi tinggi masyarakat terhadap substansi kepemimpinan muda yang terungkap dalam temuan penelitian sejalan dengan konsep transformational leadership yang dikemukakan oleh Burns (1978) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Bass dan Riggio (2006). Transformational leadership tidak hanya tentang karisma atau popularitas, tetapi tentang kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan followers untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dari kepentingan pribadi. Dalam konteks politik, ini berarti kemampuan untuk mentranslasikan energi dan idealisme menjadi program konkret, kebijakan yang berdampak, dan perubahan sistemik (Avolio et al., 2009). Harapan masyarakat bahwa kepemimpinan muda harus diimbangi dengan kedewasaan dan orientasi melayani mengindikasikan bahwa publik Indonesia memiliki literasi politik yang cukup matang untuk membedakan antara popularitas simbolik dengan kapabilitas substantif. Ini menjadi tantangan

sekaligus peluang bagi PSI untuk membuktikan bahwa partai kaum muda bukan hanya tentang demografi kader tetapi tentang kualitas kepemimpinan dan substansi politik yang ditawarkan.

c. Skeptisisme Terhadap Kredibilitas dan Kemandirian Politik

Skeptisisme terhadap kemandirian politik PSI dapat dianalisis melalui konsep autonomy dan accountability dalam studi partai politik. Katz dan Mair (1995) dalam teori tentang cartel party menjelaskan bahwa partai-partai modern menghadapi dilema antara kebutuhan untuk mendapatkan sumber daya dari negara atau elite ekonomi dengan tuntutan untuk tetap independen dan akuntabel kepada konstituen mereka. Dalam kasus PSI, proximity kepemimpinan partai dengan struktur kekuasaan eksekutif menciptakan persepsi tentang potential conflict of interest yang dapat mengurangi independensi partai dalam melakukan fungsi kontrol dan oposisi. Van Biezen (2004) menjelaskan bahwa otonomi partai politik merupakan prasyarat fundamental untuk demokrasi yang sehat, karena tanpa independensi, partai tidak dapat secara efektif merepresentasikan kepentingan konstituen dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Persepsi tentang ketergantungan PSI kepada privilege dan pengaruh keluarga penguasa mengancam kredibilitas partai sebagai agen perubahan yang autentik.

Pertanyaan kritis tentang inkonsistensi afiliasi politik dalam satu keluarga mencerminkan concern yang lebih luas tentang instrumentalisasi partai politik untuk kepentingan elite atau keluarga tertentu. Dalam literatur tentang demokratisasi, fenomena ini sering dikaitkan dengan apa yang oleh O'Donnell (1996) disebut sebagai "delegative democracy", di mana institusi demokrasi formal ada tetapi praktik politik masih didominasi oleh logika personalistik dan patrimonialistik. Robison dan Hadiz (2004) dalam analisis mereka tentang reorganisasi kekuasaan pasca-Otoriter di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi transisi demokrasi, struktur oligarkis dalam politik Indonesia tetap bertahan dengan cara-cara baru yang lebih halus dan terlegitimasi secara prosedural. Dalam konteks ini, kehadiran anggota keluarga presiden di partai yang berbeda dapat dipersepsikan sebagai manifestasi dari strategi oligarki untuk memperluas jangkauan kekuasaan sambil tetap mempertahankan kontrol atas berbagai institusi politik.

Implikasi skeptisisme ini terhadap kapasitas PSI sebagai kekuatan oposisi atau kontrol dapat dipahami melalui konsep "effective opposition" dalam studi demokrasi. Dahl (1971) menekankan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan oposisi yang efektif yang mampu mengkritisi, mengawasi, dan menawarkan alternatif terhadap kebijakan pemerintah yang berkuasa. Levitsky dan Way (2010) lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam competitive authoritarian regimes, oposisi sering menghadapi structural constraints yang menghambat efektivitas mereka, termasuk keterbatasan akses ke media, sumber daya, dan tekanan politik baik langsung maupun tidak langsung. Meskipun Indonesia adalah demokrasi elektoral, Mietzner (2020) menunjukkan bahwa praktik politik masih mengandung elemen-elemen yang membatasi kompetisi politik yang genuinely fair. Bagi PSI, tantangan untuk membangun kredibilitas sebagai oposisi yang efektif menjadi lebih kompleks karena persepsi koneksi kepemimpinan partai dengan establishment, yang dapat menciptakan ambiguitas dalam posisi dan sikap politik partai terhadap kebijakan pemerintah. Untuk mengatasi skeptisisme ini, PSI perlu secara konsisten mendemonstrasikan independensi politik melalui sikap kritis yang substantif terhadap kebijakan yang bermasalah, transparansi dalam pengambilan keputusan partai, dan konsistensi antara retorika dengan praktik politik yang dilakukan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas persepsi masyarakat terhadap PSI sebagai partai yang mengklaim merepresentasikan kaum muda, yang ditandai oleh ambivalensi antara apresiasi dan skeptisisme. Di satu sisi, terdapat apresiasi terhadap idealisme, energi, dan

komitmen pada nilai-nilai perubahan yang dibawa PSI sebagai partai milenial, yang resonan dengan aspirasi sebagian masyarakat untuk pembaruan politik dan alternatif dari partai-partai established yang dianggap korup dan konvensional. Namun di sisi lain, terdapat skeptisisme yang signifikan terkait legitimasi kepemimpinan Kaesang yang dipersepsikan lebih didasarkan pada privilege dan koneksi keluarga ketimbang meritokrasi dan pengalaman politik yang memadai. Dinamika politik keluarga yang muncul dari pilihan afiliasi politik yang berbeda dalam satu keluarga penguasa menimbulkan pertanyaan serius tentang kemandirian, integritas, dan konsistensi ideologi PSI, yang pada akhirnya mengikis kredibilitas partai sebagai agen perubahan yang autentik dan independen.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa label "partai kaum muda" saja tidak cukup untuk membangun legitimasi dan dukungan politik yang kuat tanpa diimbangi dengan substansi kepemimpinan, konsistensi antara narasi dengan praktik, dan demonstrasi nyata dari independensi politik. Tantangan terbesar yang dihadapi PSI adalah bagaimana mentransformasikan popularitas simbolik dan visibilitas media menjadi kepercayaan publik yang solid dan dukungan elektoral yang signifikan, dalam konteks sistem politik Indonesia yang masih ditandai oleh praktik oligarkis, politik dinasti, dan struktur patron-klien yang kuat. Untuk memenangkan kepercayaan masyarakat yang lebih luas, PSI perlu melampaui retorika generasional dan fokus pada pembangunan kapasitas organisasi, pengembangan kader yang berkualitas, perumusan program yang konkret dan relevan, serta konsistensi dalam memperjuangkan nilai-nilai yang dikampanyekan terlepas dari tekanan atau kepentingan politik jangka pendek. Keberhasilan PSI dalam navigasi dilema antara memanfaatkan popularitas kepemimpinannya dengan membangun identitas politik yang autentik dan independen akan menentukan sustainability dan relevansi partai dalam lanskap politik Indonesia ke depan.

E. Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Weber, T. J. (2009). Leadership: Current theories, research, and future directions. *Annual Review of Psychology*, 60, 421-449.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Psychology Press.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). SAGE Publications.
- Furlong, A., & Cartmel, F. (2007). *Young people and social change: New perspectives* (2nd ed.). Open University Press.
- Herdiansah, A. G., Junaidi, & Ismiati. (2017). Pemilih pemula dalam kontestasi pemilihan kepala daerah: Studi kasus di Kota Bandung tahun 2013. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2), 119-128.
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party. *Party Politics*, 1(1), 5-28.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War*. Cambridge University Press.

- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411-427.
- Mannheim, K. (1952). The problem of generations. In P. Kecskemeti (Ed.), *Essays on the sociology of knowledge* (pp. 276-322). Routledge & Kegan Paul.
- Mietzner, M. (2020). Rival populisms and the democratic crisis in Indonesia: Chauvinists, Islamists and technocrats. *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 420-438.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Norris, P. (2005). *Radical right: Voters and parties in the electoral market*. Cambridge University Press.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.
- O'Donnell, G. (1996). Illusions about consolidation. *Journal of Democracy*, 7(2), 34-51.
- Pamungkas, S. (2018). *Partai politik: Teori dan praktik di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism.
- Qodari, M. (2019). Jokowi's electability: The role of social media and voter segmentation. In T. Power & E. Warburton (Eds.), *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?* (pp. 193-209). ISEAS Publishing.
- Querubin, P. (2016). Family and politics: Dynastic persistence in the Philippines. *Quarterly Journal of Political Science*, 11(2), 151-181.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.
- Van Biezen, I. (2004). Political parties as public utilities. *Party Politics*, 10(6), 701-722.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.